

## Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik Melalui Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Semarang

Fatkuroji

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang  
[fatkuroji@rocketmail.com](mailto:fatkuroji@rocketmail.com)

**Abstrak:** Isu tentang ketidakseimbangan ketersediaan guru di sekolah, baik sebagai guru kelas, maupun guru mata pelajaran terus berlarut, tanpa ada pemecahan yang konkrit mulai pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, hingga nasional. Penelitian ini, dilakukan untuk mengetahui mengenai kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan, penataan dan pemerataan kinerja guru. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif serta studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, FGD, dan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan, reduksi data, penyajian data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan guru tampaknya selama ini penghitungan kebutuhan guru kelas dan guru mapel PNS di sekolah langsung diatasi dengan pengangkatan guru non PNS. Hampir disemua jenjang tingkat pendidikan kekurangan guru, dan masih terdapat beberapa guru yang kurang memenuhi standar kompetensi serta banyaknya guru yang memasuki pensiun menambah banyaknya kebutuhan guru di kabupaten semarang.

**Kata kunci :** Kinerja, Penataan, Pemerataan, Kebijakan

**Abstract:** The issue of imbalance in the availability of teachers in schools, whether as classroom teachers, or subject teachers continues to follow, without any concrete solutions starting at education, district, provincial and national levels. This research was conducted to find out about the policy of education office of Semarang Regency in improving, arranging and equity of teacher performance. The research type is qualitative research and case study. Technique of collecting data in this research is done by interview method, FGD, and document. Data analysis in this study by using, data reduction, data presentation, take conclusions and verification. Based on the results of the calculation of the needs of teachers seems to have been calculating the needs of class teachers and teachers census civil servants in schools directly addressed by the appointment of non-civil servant teachers. Almost all levels of education lack of teachers, and there are still some teachers who do not meet the standards of competence and there are still some teachers who do not meet the competency standards as well as the number of teachers entering retirement increase the number of teachers in the district of Semarang.

**Keywords:** Performance, Setup, Equity, Policy

### Pendahuluan

Isu tentang ketidakseimbangan ketersediaan guru di sekolah, baik sebagai guru kelas, maupun guru mata pelajaran terus berlarut, tanpa ada pemecahan yang konkrit mulai pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, hingga nasional.

Dampak dari ketidakseimbangan distribusi guru ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan.

Salah satu sebab dari ketidakseimbangan penyebaran guru adalah sistem informasi guru belum dibangun secara terpadu. Sumber data yang memadai melalui NUPTK belum dimanfaatkan secara maksimal. Demikian juga dengan data pokok pendidikan (DAPODIK), di sisi lain, belum dianalisis secara rinci berdasarkan kebutuhan informasi untuk kebijakan, baik dalam peningkatan mutu layanan pendidikan secara umum, maupun untuk kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan guru tampaknya selama ini penghitungan kebutuhan guru dihitung per sekolah, kekurangan guru mapel PNS di sekolah langsung diatasi dengan pengangkatan guru mata pelajaran non PNS. Masalahnya ketika dihitung kebutuhan guru dengan model mobilitas di 4 mata pelajaran kelebihan guru dan di 5 mata pelajaran kekurangan guru. Hitungan total, kelebihan guru mata pelajaran non PNS sebanyak 144 guru. Alternative

kebijakan yang dipilih adalah mobilisasi guru mapel PNS secara terkoordinasi dan pengendalian pengangkatan guru wiyata bhakti. Dinas pendidikan harus memetakan beban mengajar guru, guru yang belum memenuhi kewajiban beban mengajar 24 jam kemudian dinas juga harus memiliki peta kebutuhan guru mapel per sekolah, sehingga guru-guru yang belum dapat memenuhi beban mengajar dinas pendidikan dapat mencarikan alternative pemenuhannya.

Peraturan Bersama 5 Menteri, yaitu Mendikbud, Mendagri, MenPAN, Menag, dan MenKeu tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS merupakan langkah awal untuk menata dan memeratakan guru antar sekolah, kabupaten/kota, dan antar provinsi. Untuk menindaklanjuti Perber 5 menteri tersebut, Kemdikbud telah membuat Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan penataan tersebut. Namun demikian, Juknis tersebut belum cukup dapat dijadikan panduan oleh staf Dinas Pendidikan kabupaten/Kota. Untuk membantu dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi mengimplementasikan Perber 5 menteri. Analisis data oleh Dinas

Pendidikan selama ini masih dilakukan secara manual. Cara yang menyebabkan proses analisis dianggap rumit dan memerlukan skill ICT yang tinggi. Berbagai software yang dapat digunakan untuk analisis sudah dikembangkan, dari Microsoft Excel sampai SPSS. Tetapi seringkali pengolahan dengan berbagai software inipun masih memerlukan langkah-langkah manual untuk pengumpulan, entri data, desain analisis, analisis dan juga penyajiannya.

Analisis pemetaan yang dilakukan selama ini oleh satuan pendidikan dan kabupaten/kota belum mencerminkan analisis yang komprehensif. Kabupaten/kota hanya melakukan analisis agregat dari satuan pendidikan dan analisisnya hanya satu dimensi, sehingga yang tampak adalah berapa sekolah kelebihan dan berapa sekolah kekurangan guru. Analisis yang sedikit lebih lengkap, seperti tabulasi silang antar dua atau lebih faktor belum dilakukan, padahal melalui analisis ini informasi tentang peta guru akan lebih lengkap, terutama untuk penataan distribusi guru yang berkeadilan.

Pada gilirannya formulasi kebijakan diperlukan dalam rangka

implementasi penataan dan pemerataan guru. Formulasi kebijakan yang baik didasarkan pada data yang dianalisis secara cermat. Kebijakan yang diformulasikan dengan tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pendidikan, khususnya penataan dan pemerataan guru. Perencanaan pendidikan yang efisien dan efektif akan mengarahkan penataan dan pemerataan guru di tingkat kabupaten/kota pada sasaran yang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan penataan dan pemerataan guru perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan sehingga terjamin penganggarannya.

William N. Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti

dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Secara etimologis, kebijaksanaan merupakan terjemahan dari kata *policy*, yang oleh Supardi dibagi menjadi tiga kata yaitu: *pilitic*, *policy* dan *polic* (Imron, Ali, 1996:13).

Berkenaan dengan kinerja Sanusi (1991:38) menjelaskan bahwa kinerja guru (sebagai pengajar) mencakup tugas aspek kemampuan sebagai

berikut: 1) Kemampuan profesional yang terdiri atas: penguasaan materi pelajaran, penguasaan dan penghayatan atas landasan kependidikan dan keguruan serta penguasaan terhadap proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. 2) kemampuan sosial yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tujuan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu melaksanakan tugasnya sebagai guru. 3) Kemampuan personal yang meliputi: penampilan sikap positif terhadap keseluruhan situasi, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai guru dalam setiap penampilannya agar menjadi panutan siswa.

Undang- Undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa pendidik dan pekerja profesional yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan demikian pendidik diharapkan mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Didalam UUGD ditentukan bahwa : a) Seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (*Pasal 8*). b) Kualifikasi akademik diperoleh melalui perguruan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru (*pasal 9*) dan S-2 untuk dosen (*Pasal 46*). c) Kompetensi profesi pendidik memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (*Pasal 19*).

Dapat disimpulkan bahwa kinerja seorang guru dapat dilihat dari sejauhmana guru itu melaksanakan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab, kemampuan menggerakkan dan memotivasi siswa untuk berinteraksi dalam belajar dan kerjasamanya dengan guru lain.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif serta studi kasus sebagai bentuk penelitian yang mendalam (Nasution 2001:27). Sifat studi kasus penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai data kinerja guru SD di Kab Semarang.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan, yaitu dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode (a) wawancara dan FGD, data ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai distribusi dan kinerja guru yang telah dilaksanakan (b) pengumpulan bahan-bahan dokumen, data ini peneliti gunakan untuk memperkuat data hasil distribusi dan kinerja guru Kab Semarang. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi (Nasution 2001:129).

### **Hasil Penelitian**

#### ***Hasil Pemetaan Distribusi Guru***

Dari data DAPODIK setelah dilakukan proses import data dan

generate data dengan menggunakan menghasilkan rangkuman data sebagai software SIMPK\_DAPODIK berikut :

**Tabel 1 : Data Sekolah Dasar yang dianalisis**

Komponen	Negeri	Swasta
Jml Sekolah	495	36
Jml Rombel	3019	311
Jml Siswa	70025	8106
Jml Gr PNS	3703	23
Jml Gr Non PNS	950	377
Jml Gr Kl. PNS	2530	10
Jml Gr KL. Non PNS	487	276

Berdasarkan hasil unduhan data diimport dan di-generate dengan dari Pusat Data DAPODIK, menggunakan SIMPK\_DAPODIK teridentifikasi jumlah sekolah dasar output\_nya sebanyak 495 sekolah atau negeri di Kabupaten Semarang sebanyak sama dengan 100%. 495 sekolah. Dari 495 sekolah setelah

#### ***Distribusi Guru SD***

Kecukupan Guru Kelas PNS di SD Negeri dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah guru kelas PNS yang tersedia dikurangi dengan jumlah rombel sebagai kebutuhan guru kelas. Jika angka menunjukkan minus berarti kekurangan guru kelas. Sebaliknya jika hasilnya menunjukkan angka plus berarti kelebihan guru kelas. Hasil penghitungan sebagai kecukupan guru kelas :

**Tabel 2 : Kecukupan Guru Kelas PNS per Kecamatan**

Kecamatan	Jml SDN	Kebut Gr Kls	Jml Gr kls PNS	Kecukupan Gr Kl PNS	Jml Gr kls Non PNS	KS sbg Gr Kelas
Ambarawa	23	146	117	-29	31	8
Bancak	13	80	65	-15	10	1
Bandungan	22	121	110	-11	18	4
Banyubiru	25	148	128	-20	26	14
Bawen	22	137	126	-11	16	16
Bergas	28	161	140	-21	28	3
Bringin	27	166	126	-40	33	7
Getasan	27	163	115	-48	32	4
Jambu	22	133	106	-27	20	0
Kaliwungu	25	156	107	-49	41	5
Pabelan	25	151	119	-32	28	1
Pringapus	25	153	126	-27	39	19
Sumowono	26	150	138	-12	16	12

Suruh	35	212	155	-57	34	5
Susukan	30	179	142	-37	29	8
Tengaran	34	214	177	-37	27	1
Tuntang	31	205	168	-37	40	6

Berdasarkan tabel 2 : dapat dikemukakan bahwa yang tersebar di 19 kecamatan terdapat 2466 guru kelas PNS, sedangkan kebutuhan guru kelas sebanyak 3019 guru, sehingga Kabupaten Semarang kekurangan guru kelas PNS sebanyak 553 guru. Di sisi lain, tersedia kelas Non PNS sebanyak 524 guru. Guru kelas Non PNS ini menutup kekurangan guru kelas PNS. Kepala sekolah juga ada yang merangkap menjadi guru kelas sebanyak 137 orang, dengan demikian tidak ada rombongan belajar yang tidak terlayani oleh guru kelas.

### *Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD*

Tabel 3: Kecukupan Guru PNS Mapel Penjaskes di SD Negeri

Kecamatan	Jml SDN	Jml Rombel	Jml Gr PNS	Kebut h Gr	Kecukpan Gr	Jml Gr Non PNS	KS Gr Penjas
Ambarawa	23	146	16	21	-5	8	1
Bancak	13	80	9	12	-3	0	0
Bandungan	22	121	14	18	-4	3	0
Banyubiru	25	148	13	22	-9	7	2
Bawen	22	137	18	20	-2	2	0
Bergas	28	161	17	23	-6	6	6
Bringin	27	166	23	24	-1	2	0
Getasan	27	163	14	24	-10	3	0
Jambu	22	133	14	19	-5	3	0
Kaliwungu	25	156	13	23	-10	4	0
Pabelan	25	151	15	22	-7	2	0
Pringapus	25	153	16	22	-6	5	1
Sumowono	26	150	13	22	-9	6	1
Suruh	35	212	18	31	-13	9	0
Susukan	30	179	22	26	-4	3	1
Tengaran	34	214	16	31	-15	12	1
Tuntang	31	205	21	30	-9	5	1
Ungaran Barat	32	195	23	29	-6	7	1
Ungara Timur	23	149	18	22	-4	6	0
<b>Grand Total</b>	<b>495</b>	<b>3019</b>	<b>313</b>	<b>440</b>	<b>-127</b>	<b>93</b>	<b>15</b>

Hasil penghitungan di SD Negeri menunjukkan bahwa kebutuhan guru mata pelajaran Penjaskes di SD Negeri Kabupaten Semarang sebanyak 440, sementara tersedia guru Penjaskes PNS sebanyak 313 guru sehingga kekurangan guru PNS mapel Penjaskes sebanyak 127 guru. Guru Penjaskes Non PNS tersedia 93 guru sehingga secara keseluruhan masih kelebihan guru Penjaskes sebanyak 34 guru. Sementara itu, Kepala Sekolah yang merangkap sebagai guru mapel Penjaskes sebanyak 15 guru.

### *Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD*

Tabel 4 : Kecukupan Guru PNS Mapel Pendidikan Agama Islam di SD Negeri

Kecamatan	Jml SDN	Jml Rombel	Jml Gr PNS	Kebuth Gr	Kecukupan Gr	Jml Gr Non PNS	KS Gr Penjas
Ambarawa	23	146	13	18	-5	10	2
Bancak	13	80	6	10	-4	0	0
Bandungan	22	121	7	15	-8	10	0
Banyubiru	25	148	17	19	-2	5	0
Bawen	22	137	14	17	-3	6	1
Bergas	28	161	8	20	-12	23	1
Bringin	27	166	22	21	1	3	0
Getasan	27	163	10	20	-10	6	0
Jambu	22	133	15	17	-2	3	0
Kaliwungu	25	156	21	20	2	3	0
Pabelan	25	151	19	19	0	2	1
Pringapus	25	153	12	19	-7	8	0
Sumowono	26	150	19	19	0	4	0
Suruh	35	212	27	27	1	2	2
Susukan	30	179	17	22	-5	6	2
Tengaran	34	214	23	27	-4	6	3
Tuntang	31	205	24	26	-2	2	0
Ungaran Barat	32	195	16	24	-8	13	1
Ungaran imur	23	149	12	19	-7	6	1
<b>Grand Total</b>	<b>495</b>	<b>3019</b>	<b>302</b>	<b>377</b>	<b>-75</b>	<b>118</b>	<b>14</b>

Berdasarkan tabel dan grafik kekurangan guru PNS sebanyak 75 kecukupan guru mapel PAI di SD guru. Jumlah guru Non PNS mapel PAi Negeri dapat dikemukakan bahwa sebanyak 118 guru, sehingga total kebutuhan guru mapel PAI di SD kelebihan guru mapel PAi di SD Negeri sebanyak 377 guru, sementara Negeri sebanyak 43 guru. Sementara tersedia guru PNS Mapel PAI sebanyak iru, Kepala Sekolah yang menjadi guru mapel PAI sebanyak 14 orang.

**Rasio Siswa Rombel**

Rasio Siswa Rombel menggambarkan besaran jumlah siswa per rombongan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa rasio siswa

rombel di SD maksimal 32 siswa per rombongan. Rasio siswa rombel SD di Kabupaten Semarang dapat digambarkan pada table berikut:

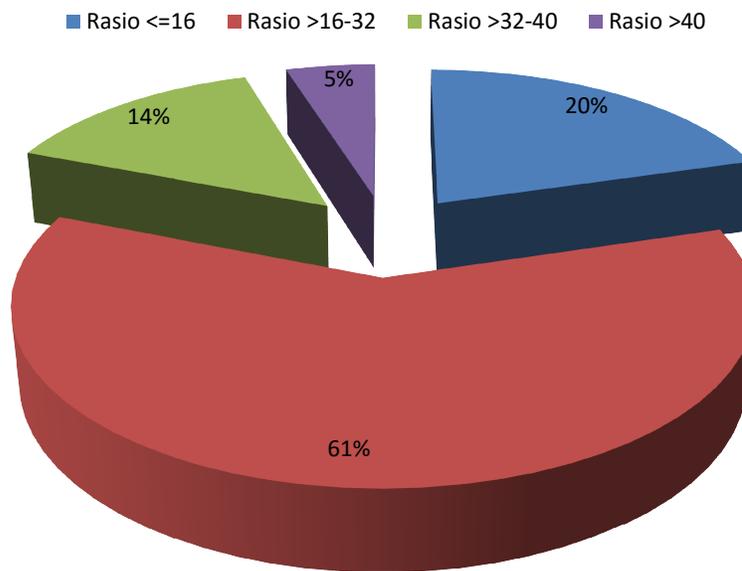
**Tabel 5 : Rasio siswa Rombel**

Rasio Siswa Rombel	Jml SD Negeri	Persen
Rasio <=16	130	24%
Rasio >16-32	305	57%
Rasio >32 - 40	72	14%
Rasio >40	24	5%
<b>Grand Total</b>	<b>531</b>	<b>100%</b>

Sekolah yang memenuhi SPM Rasio siswa rombel sebanyak 57% atau sama dengan 305 SD, dan hanya 19% atau 96 sekolah yang belum memenuhi SPM. Jika diperhatikan lebih jauh 435 SD yang memenuhi SPM, ada 130 SD

Negeri atau 24% yang rasio siswa rombelnya sangat kecil yaitu <=16 atau setengahnya SPM. Dengan grafik SD Negeri dengan rasio siswa Rombel <=16 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 1 : Rasio Siswa Rombel guru PNS di SD Negeri**



**Kualifikasi Guru Sekolah Dasar** S1/DIV, berdasarkan ketentuan Ketentuan Standar Pelayanan tersebut maka sekolah dasar di Minimal (SPM) di SD/MI menyatakan Kabupaten Semarang dapat dipetakan bahwa minimal tersedia 2 (dua) orang guru SD/MI yang telah berkualifikasi

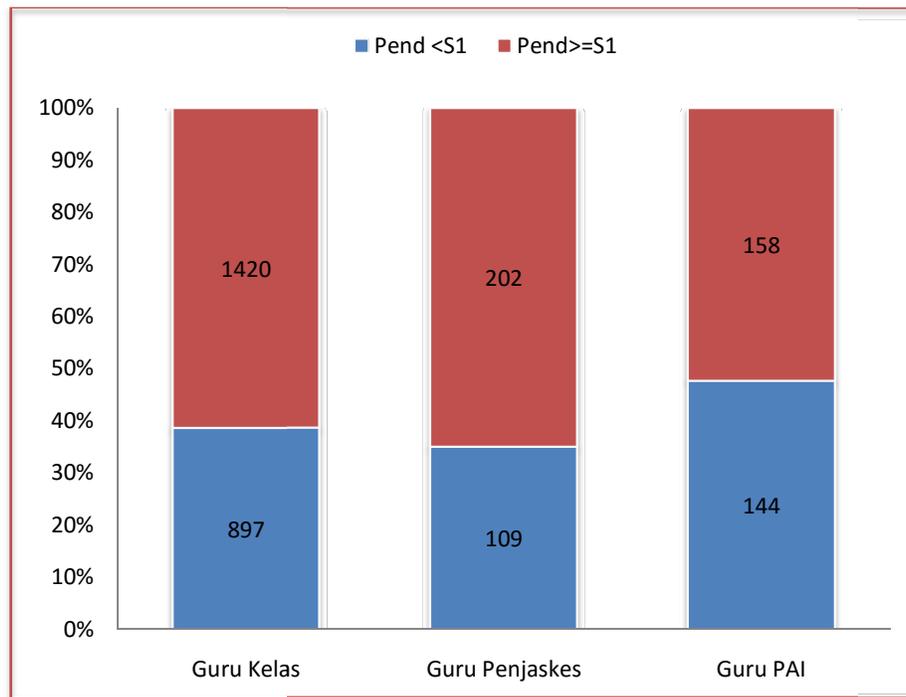
**Tabel 6 : Pemenuhan SPM Kualifikasi Guru SD**

Row Labels	Negeri		Swasta		Total	
	Jml Sekolah	Persen	Jml Sekolah	Persen	Jumlah	Persen
Jml Guru S1/D4 <2	7	1%	1	3%	8	2%
Jml Guru S1/D4 >=2	488	99%	35	97%	523	98%
<b>Grand Total</b>	<b>495</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>531</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel 9 : hanya ada 8 SD atau sama dengan 2% SD yang belum memenuhi kriteria SPM tentang kecukupan guru berkualifikasi S1/DIV. Undang-undang guru dan dosen

menyatakan bahwa guru sekolah dasar minimal harus berkualifikasi S1/DIV, berdasarkan ketentuan tersebut maka peta kualifikasi guru SD berkualifikasi S1/DIV adalah sebagai berikut :

**Grafik 2 : Kualifikasi Guru PNS di SD Negeri**



Masih ada 897 guru kelas PNS di SD atau 39% yang belum berkualifikasi S1/DIV, sementara 144 guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) atau 48% di SD dan 109 guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) atau 35% di SD yang belum

berkualifikasi S1/DIV.

### Guru Sekolah Dasar Tersertifikasi

SPM menyatakan bahwa di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang telah tersertifikasi, berdasarkan SPM tersebut maka peta sekolah yang telah memenuhi SPM tentang guru tersertifikasi sebagai berikut :

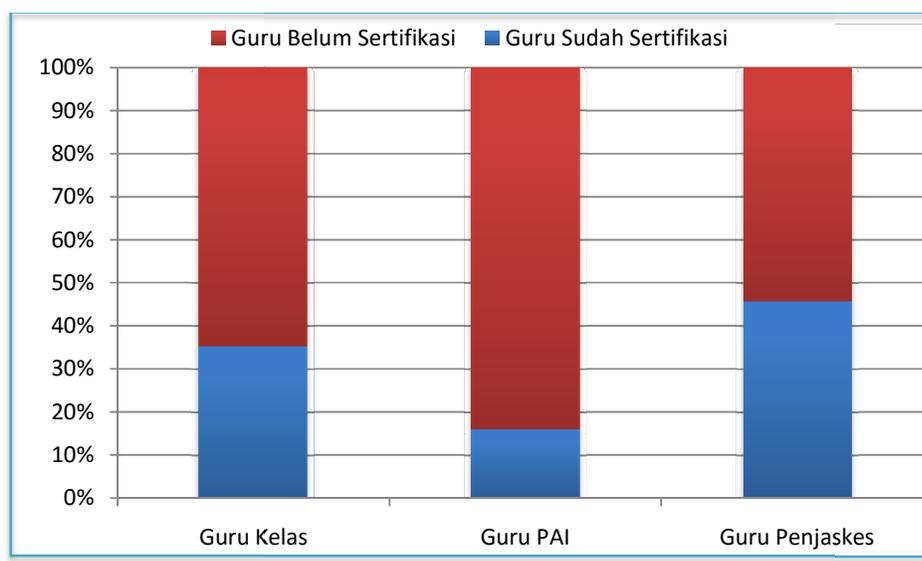
**Tabel 8 : Ketersediaan Guru SD Tersertifikasi**

Jml Guru Sertifikasi	Negeri		Swasta		Total	
	Jml Sekolah	Persen	Jml Sekolah	Persen	Jml	Persen
Jml Guru Sertifikasi < 2	2	0%		0%	2	0%
Jml Guru Sertifikasi >=2	493	100%	36	100%	529	100%
<b>Grand Total</b>	<b>495</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>531</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel 10 dapat dikemukakan bahwa tinggal 2 SD Negeri yang belum memenuhi SPM tentang ketersediaan guru tersertifikasi.

Untuk melihat lebih jauh jumlah guru PNS yang belum berkualifikasi S1/DIV di SD dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

**Grafik 3 : Guru PNS SD Tersertifikasi**



Berdasarkan data di atas masih ada 880 atau 35% guru kelas PNS di sekolah dasar yang belum tersertifikasi, sementara guru PAI PNS masih 48 orang atau 16%, dan 140 orang atau 46% guru Penjaskes PNS belum tersertifikasi (data dapodik kota semarang tahun 2015).

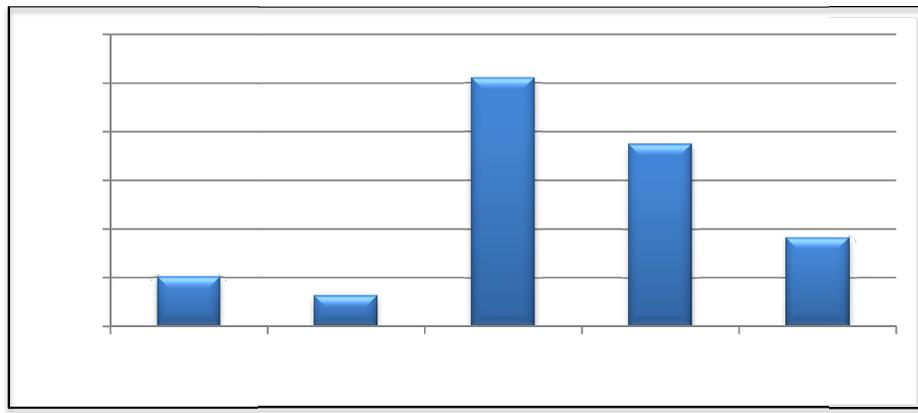
#### Outflow Guru Sekolah Dasar

Guru Kelas PNS di SD Negeri

dapat dikelompokkan berdasarkan usia

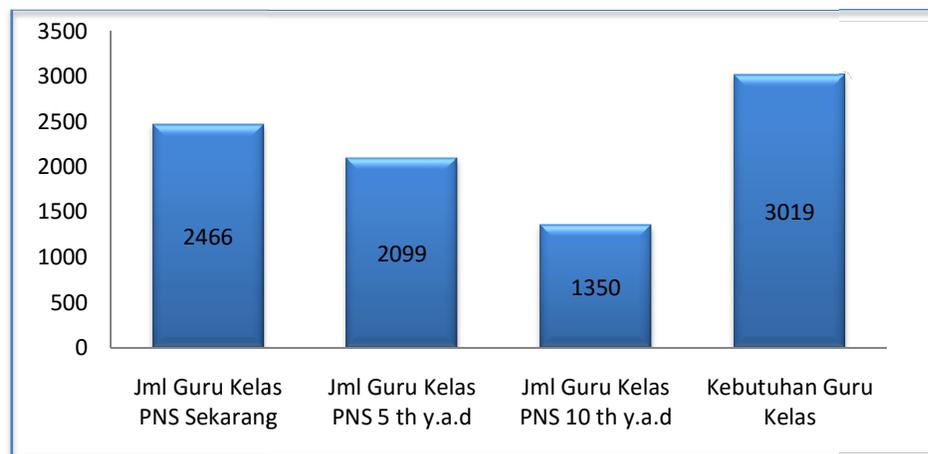
guru di dalam grafik di bawah ini :

**Grafik 4 : Kelompok Usia Guru Kelas PNS di SD Negeri**



Grafik 4 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang guru kelas PNS yang akan memasuki masa pensiun sebanyak 364 guru, sedangkan dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang guru yang akan pensiun sebanyak 1113 guru (Data dapodik Kota Semarang tahun 2014).

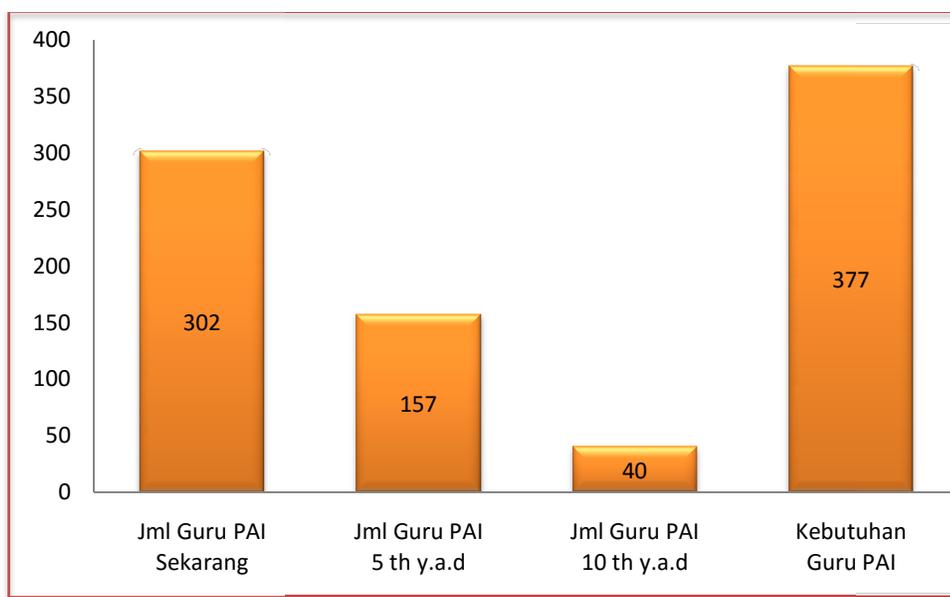
**Grafik 5 : Jumlah Guru Kelas PNS di SD Negeri 5-10 tahun y.a.d**



Jumlah guru kelas PNS sekarang sebanyak 2466 guru, Apabila dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang tidak ada pengangkatan guru maka guru kelas PNS tinggal 2099 guru. Dalam kurun waktu 10 tahun akan datang guru kelas PNS tinggal 1350 guru, sementara kebutuhan guru kelas 3019 guru maka kekurangan guru kelas menjadi 1699 guru.

### Guru Pendidikan Agama Islam PNS di SD Negeri

Grafik 6 : Jumlah Guru PAI PNS di SD Negeri 5-10 tahun y.a.d

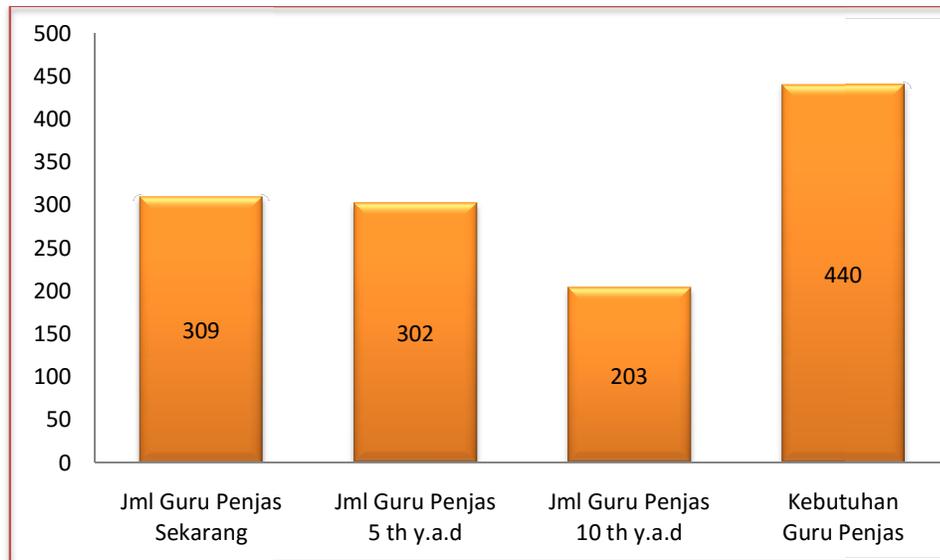


Jumlah guru Mapel PAI di SD Negeri sekarang sebanyak 302 guru, kebutuhan guru 377 guru, saat ini kekurangan guru mapel PAI sebanyak 75 guru. Dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang guru mapel PAI tinggal 157 guru, artinya dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang akan kekurangan guru mapel PAI lebih besar apabila tidak ada pengangkatan CPNS untuk guru mapel PAI di SD Negeri . Dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang guru mapel PAI tinggal 40 guru, maka jika dalam 10 tahun tidak ada pengangkatan guru CPNS kekurangan guru mapel PAI akan semakin banyak jumlahnya (Data Dapodik Kab. Semarang diolah oleh TIM USAID Prioritas dan UIN Semarang, tahun 2014).

**Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan** Negeri dapat dikelompokkan berdasarkan usia guru di dalam grafik

Guru Penjaskes PNS di SD di bawah ini :

**Grafik 7 : Jumlah Guru Penjaskes PNS di SD Negeri 5-10 tahun y.a.d**



Kebutuhan guru mapel Penjaskes PNS mapel Penjaskes tinggal 203 guru, 440 orang, sementara ketersediaan guru sehingga kekurangan guru PNS mapel mapel Penjaskes PNS sebanyak 309 guru, saat ini Kabupaten Semarang kekurangan guru PNS mapel Penjaskes sebanyak 131 guru. Dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang guru mata pelajaran Penjaskes tinggal 302 guru, dalam kurun waktu 10 tahun guru

Distribusi usia guru SD Negeri yang akan memasuki masa pensiun dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9 : Kelompok Usia Guru PNS di SD Negeri**

Jenis Guru	Kelompok Usia 51-55					Kelompok Usia 56-60					Grand Total
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Guru Kelas	180	153	157	146	122	100	69	65	49	83	1124
Guru Penjaskes	31	27	21	11	9	3	1	0	1	2	106
Guru PAI	22	22	31	19	23	18	27	26	37	34	259
<b>Jumlah</b>	<b>233</b>	<b>202</b>	<b>209</b>	<b>176</b>	<b>154</b>	<b>121</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>119</b>	<b>1489</b>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan guru, baik untuk guru kelas, guru PAI dan guru penjas tahun-tahun berikutnya akan semakin banyak.

### Penutup

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dimunculkan isu-isu strategis dalam distribusi dan kinerja guru sebagai berikut :

Kebutuhan guru kelas PNS di SD Negeri sebanyak 3019 guru, ketersediaan guru kelas PNS di SD Negeri sebanyak 2466 sehingga kekurangan guru kelas PNS sebanyak 553 guru. Sementara tersedia guru kelas non PNS di SD Negeri sebanyak 524 guru, jumlah guru kelas PNS dan non PNS di SD Negeri sebanyak 2990 guru, dengan demikian masih kekurangan 29 guru kelas di SD Negeri. Sementara itu Kepala Sekolah yang merangkap sebagai guru kelas sebanyak 137 orang.

Kebutuhan guru PNS mata pelajaran PAI di SD Negeri sebanyak 377 guru, ketersediaan guru PNS PAI sebanyak 302, sehingga masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 75 guru. Ketersediaan guru non PNS

mapel PAI di SD Negeri sebanyak 118 guru, secara keseluruhan guru PAI di SD Negeri lebih sebanyak 43 guru. Sementara itu, Kepala Sekolah yang mengajarkan mapel PAI sebanyak 14 orang.

Berdasarkan perhitungan, kebutuhan guru Penjas di SD Negeri sebanyak 440 guru, sementara tersedia guru PNS Penjas sebanyak 313 guru sehingga kekurangan guru Penjas PNS sebanyak 127 guru. Jumlah guru Penjaskes Non PNS di SD Negeri sebanyak 93 guru, jumlah guru Penjaskes PNS dan Non PNS sebanyak 406 guru. Secara keseluruhan guru Penjaskes di SD Negeri masih kurang 34 orang. Sementara itu, ada 15 Kepala Sekolah yang mengajarkan mapel Penjaskes.

Berdasarkan perhitungan rasio siswa rombel 435 SD Negeri (81%) memenuhi SPM RSR dan hanya 19 % yg belum memenuhi SPM. Hasil penghitungan juga menunjukkan 130 SDN (24%) memiliki RSR  $\leq 16$  (sekolah kecil). Dari 130 sekolah kebutuhan guru kelas 757 guru, tersedia guru kelas PNS 563 guru, sehingga guru kelas PNS kurang sebanyak 194 guru. Di 130 sekolah

kecil tersedia 165 guru kelas non PNS, secara keseluruhan guru kelas di SD Kecil kurang 29 guru. Terdapat 908 (37%) guru kelas PNS belum berkualifikasi S1/DIV, guru PNS PAI 144 (48%) belum S1/DIV, Guru Penjaskes masih 109 (35%). Secara keseluruhan masih 1162 guru SDN (37%) belum S1/DIV. Sejumlah 1156 guru PNS (37%) belum tersertifikasi. Dengan rincian; guru kelas 966 guru (35%), guru PAI 48 guru (16%), dan guru Penjas 142 guru (46%).

Dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang guru kelas yang pensiun sebanyak 364 guru (15%), guru PAI 142 guru (47%), dan guru Penjas 7 guru (2%) sehingga total pensiun guru sebanyak 515 guru (17%). Jika dalam waktu 10 tahun, Guru kelas yang akan pensiun sebanyak 1113 guru (45%), guru PAI 259 guru (86%), dan guru Penjas 106 guru (34%) sehingga total guru yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sebanyak 1489 guru (48%).

#### Daftar Pustaka

- Anonymous, 2001, Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Anonymous, 2004, Buku Pedoman Pembakuan Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Anonymous, 2004, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Anonymous, 2007, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Anonymous, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Bogdan, Robert. C. dan Biklen, Sari Knopp. 1990. Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar Teori dan Metode. Alih Bahasa: Munandir. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Cresswell, J. W. 1994. Research Design : Qualitative & Quantitative Approach. California: Sage Publication Inc.
- Darsono, Max dkk. 2001. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Daulay, Haidar Putra. 1991. Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Tinjauan dari Sudut Kurikulum Islam). Disertasi (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga.

- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi Suharto, 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
- Hadari Nawawi. (2000:328). Manajemen Strategis (Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoko. (1987:31-46) Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan. (2001:27-38) Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- USAID Prioritas, Tim UIN Semarang, dan Daerah, 2014. Hasil analisis pendataan dan Penataan guru (PPG) dari Data Dapodik daerah.